



PENETAPAN

Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT.002 RW.002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SD 012 Kabupaten Natuna, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT.002 RW.002, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2018 dan telah terdaftar pada Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang secara rinci sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 16 Januari 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/CA/10/1993 tanggal 30 Januari 1993;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kelurahan XXXXXXXXXXXX selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah asrama polisi Tanjungpinang selama 8 tahun, kemudian kembali di Natuna ke rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 05 Mei 1994;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat memiliki banyak selingkuhan, hal ini Penggugat ketahui dari handpone Tergugat yang banyak menyimpan pesan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain tersebut;

b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami lebam;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 02 Mei 2018, karena Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan yang bernama Yana, ini merupakan perselingkuhan Tergugat yang ketiga kalinya, bahkan setiap hari Tergugat selalu menelpon perempuan tersebut sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi, Penggugat sudah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat masih tetap dengan perilakunya itu, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah sepupu Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama Tergugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalur mediasi dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 24 Mei 2018, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa laporan mediator tersebut benar, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), dan upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**SUBHI PANTONI,
S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0079/Pdt.G/2018/PA.Ntn



KUSNOTO, S.H.I.,
M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah);